

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah atas berkat, rahmat dan karunia Allah SWT, Rencana Kerja Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 dapat disusun dengan mengacu kepada Kepmendagri Nomor 050-5589 Tahun 2021.

Rencana Kerja Dinas Pangan Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota ini memperhatikan isu strategis yang berkembang serta aspirasi pemangku kepentingan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah dalam rangka mencapai visi dan misi Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 - 2021 dengan mempedomani RJPMD 2021 - 2026.

Kami menyadari bahwa Rencana Kerja Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 ini tidak luput dari kekurangan, hingga segala koreksi dan saran perbaikan sangat kami harapkan, atas bantuan dan partisipasi yang diberikan diucapkan terimakasih.

Tanjung Pati, 17 Maret 2022
Kepala Dinas Pangan
Kabupaten Lima Puluh Kota


GUSDIAN LAORA, SKM, M.Si
NIP. 19650827 198803 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pangan Tahun 2021 dan Capaian Renstra	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pangan.....	18
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pangan...	20
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	24
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	32
BAB III TUJUAN , SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	35
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pangan	36
3.3 Program dan Kegiatan.....	36
3.3.1 Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan	36
3.3.2 Uraian garis besar	37
3.3.3 Penjelasan Rumusan Program dan Kegiatan Tidak Sesuai dengan Rancangan Awal	41
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	43
BAB V PENUTUP	55

DAFTAR TABEL

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Renja dan Renstra sampai Tahun 2021.....	8
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Dinas Pangan.....	18
Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	24
Tabel 2.5 Usulan Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023.....	32
Tabel 4.1 Rancangan Akhir Renja Tahun 2023.....	43
Tabel 4.2 Rancangan Akhir Renja Tahun 2023.....	52
Tabel 4.3 Rancangan Akhir Renja Tahun 2023.....	54

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 pasal 7 mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (PD) untuk tahun 2023. Rencana Kerja Dinas Pangan tahun 2023 adalah dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran / tujuan pembangunan urusan pangan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

Rencana Kerja Dinas Pangan disusun sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pangan yang berpedoman kepada RPJMD Pemerintah Kabupaten Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2026 dan Renstra Perangkat Daerah, bersifat indikatif, dapat digunakan sebagai instrumen Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD).

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa terkait urusan pangan merupakan urusan wajib tanpa diikuti dengan pelayanan dasar yang terdiri dari 4 (empat) sub urusan, yaitu (a) Sub urusan penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, (b) Sub urusan penyelenggaraan ketahanan pangan, (c) Sub urusan penanganan kerawanan pangan dan, (d) Sub urusan keamanan pangan.

Terkait keempat sub urusan di bidang pangan di maksud, ada 9 (sembilan) kewenangan Kabupaten/ Kota yang dijelaskan dalam Undang-undang di maksud. Kesembilan wewenang tersebut adalah :

- (a) Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan daerah Kabupaten/ Kota.

- (b) Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan.
- (c) Pengelolaan cadangan pangan Kabupaten/ Kota.
- (d) Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah Provinsi.
- (e) Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/ tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi.
- (f) Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan.
- (g) Penanganan kerawanan pangan Kabupaten/ Kota.
- (h) Pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam daerah Kabupaten/ Kota.
- (i) Pelaksanaan pengawasan pangan segar.

Untuk itu menyusun Rencana Kerja Dinas Pangan Tahun 2023 dengan memperhatikan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 3 yang berbunyi Perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah. Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatannya dapat mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 90 tahun 2019 dan Pemutakhiran Program dan Kegiatan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5589 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan amanat Permendagri Nomor 70 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sesuai dengan Bab II pasal 4 yang berbunyi Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Pemerintahan Daerah yang terdiri atas Informasi Pembangunan Daerah dan Informasi Keuangan Daerah yang bertujuan untuk menghasilkan layanan informasi Pemerintahan Daerah yang saling terhubung dan terintegrasi dengan berbasis elektronik dan dapat diakses melalui situs jaringan resmi Kementerian Dalam Negeri.

1.2 LANDASAN HUKUM

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587 diubah dengan PERPU No.2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2014);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 114);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengolahan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2006 - 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3);
21. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Rencana Kerja ini disusun dengan maksud

1. Dijadikan sebagai arah kebijakan dan program dalam pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Lima Puluh Kota selama satu tahun kedepan;
2. Sebagai penjabaran *implementatif* dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota;
3. Menjadi salah satu pedoman dan bahan acuan bagi seluruh unsur pada Dinas Pangan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan.

b. Tujuan

Tujuan pembuatan Rencana Kerja Dinas Pangan adalah :

1. Untuk mempermudah aparaturnya Dinas Pangan melaksanakan Program dan kegiatan tahun 2023.
2. Mendukung visi dan misi Kepala Daerah terkait dengan Pembangunan Ketahanan Pangan di Kabupaten Lima Puluh Kota.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut:

BABI PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

3.3 Program Dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pangan bermaksud untuk mengetahui sejauh mana capaian pelaksanaan Renja Tahun 2020. Tujuan Evaluasi hasil Renja tahun 2020 yaitu untuk menilai dan memastikan bahwa target rencana program dan kegiatan dalam Renja tahun 2020 dan sasaran Renstra dapat dicapai dalam upaya mendukung pencapaian sasaran pembangunan tahun 2020 berikut kami uraikan persentase dan realisasi keuangan Program dan Kegiatan.

Tabel 2.1
REKAPITULASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN CAPAIAN PERANGKAT DAERAH TAHUN TAHUN LALU

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021		Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
					Target Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Perangkat Daerah tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+8)	11=(10/4)
2 09 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	100%							
2 09 01	Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	85%		85%	85%	85%			
2 09 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renja Awal, Renja Perubahan, RUP Awal dan RUP Perubahan,)	3 Dokumen	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	7 Dokumen, 1 Dokumen	3 Dokumen	42,86%
2 09 01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2 09 01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2 09 01	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2 09 01	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2 09 01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Bulan	-	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%

2	09	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Bulan	-	12 Bulan	100%	12 Bulan	100%	12 Bulan	100%
2	09	01	2.02		Administrasi Keuangan	Persentase tertib administrasi keuangan	100%		100%					
2	09	01	2.02	01	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12 Bulan	-	12 Bulan	100%	12 Bulan	100%	12 Bulan	100%
2	09	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	Tersedianya dokumen administrasi pelaksanaan tugas ASN	204 Dokumen	-	-	0%	12 Bulan	0%	12 Bulan	100%
2	09	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tersedianya laporan akuntansi dan pelaporan keuangan OPD	24 Dokumen	-	-	0%	12 Bulan	0%	12 Bulan	100%
2	09	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen	-	-	0%	12 Bulan	0%	1 Dokumen	100%
2	09	01	2.02	07	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya laporan Prognosis realisasi anggaran	16 Dokumen	-	-	0%	12 Bulan	0%	12 Bulan	100%
2	09	01	2.02	08	Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen	-	12 Bulan	100%	12 Bulan	100%	12 Bulan	100%
2	09	01	2.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%							
					Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Tersedianya pakaian Dinas Bagi ASN	40 Stel	-	-	0%	42 Stel	0%	-	-
2	09	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi Umum Perangkat Daerah	100%							
2	09	01	2.06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat listrik dan elektronik kantor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	100%	12 Bulan	100%
2	09	01	2.06	02	Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat listrik dan elektronik kantor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	100%	12 Bulan	100%
						Pengadaan peralatan kebersihan kantor								
						Terpeliharanya peralatan kerja kantor dan Perbalakan peralatan Kantor								
						Tersedianya perlengkapan gedung dinas :								
						Computer	3 Unit	-						
						Laptop	3 Unit	-						
						Printer Brother	6 Unit	-						
						Printer	5 Unit	-						
						TV LED	2 Set	-						
						Infocus	1 Unit	-						
						CCTV	3 Unit	-						
						Kursi Tamu	1 Set	-						
						Genset	1 Unit	-						

2	08	01	2.08	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Paket		1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%
2	09	02			Terlaksananya rehabilitasi sedang berat, Perbaikan dan pengecatan gedung kantor	1 Paket						
2	09	02	2.01		Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	1 Paket						
2	09	02	2.01	01	Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung Kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah Kabupaten/Kota	1 Paket						
2	09	02	2.01	01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	1 Unit	1 Kelompok Lumbung Pangan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	14 kelompok 1 unit	100%
2	09	02	2.01	03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	3 Unit	-	-	-	2 Unit	1 unit 3 Unit 3 Unit	100%
2	09	02	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka penyediaan infrastruktur logistik	4 Ton Gabah	-	-	-	2 Kali, 12 Ton	2 Kali, 12 Ton	100%
2	09	02	2.01	05	Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	3 Unit	-	-	-	2 Kali, 12 Ton	2 Kelompok, 2 Kelompok	100%
2	09	03			Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat							
2	09	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan							
2	09	03	2.01	01	Penyediaan informasi harga pangan dan Neraca Bahan Makanan	1 Buku	13 Kecamatan	1 Buku	1 Buku	13 Kecamatan, 1 Buku, 1 Buku	1 Buku	100%
2	09	03	2.01	02	Penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal	1 Kall	-	5 Kelompok, 9 Kelompok	5 Kelompok, 9 Kelompok	1 Kall	1 Kall	100%
					Terlaksananya festival menu B2SA dan pangan lokal penunjang pariwisata	1 Kall	-	5 Kelompok, 9 Kelompok	5 Kelompok, 9 Kelompok	1 Kall	1 Kall	100%

2	09	04	2.01	02	Pemberdayaan Masyarakat dan Penggerakragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Terlaksananya kegiatan advokasi optimalisasi pemanfaatan di Nagari	1 Kali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
						- Terlaksananya pendampingan kelompok KRPL, pertemuan kelompok sekolah lapang dan pembinaan	3 Nagari												
						- Terlaksananya penyaluran bantuan rumah pembibitan, sarana dan benih, bibit	3 Kelompok												
						- Tersedianya promosi	1 Rim												
2	09	04	2.01	03	Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan evaluasi konsumsi per Kapita per Tahun	- Terlaksananya kegiatan advokasi optimalisasi pemanfaatan di Nagari	3 Nagari	-	3 Nagari	3 Nagari	79 Nagari	79 Nagari	100%	100%	13 Kecamatan	13 Kecamatan	100%	100%	
2	09	04			Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase penanganan daerah rawan pangan dalam meujudkan Kemandirian dan Kedaulatan Pangan Masyarakat													
2	09	04	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Teridentifikasi Wilayah Kecamatan yang Rawan Pangan dan Tahap Pangan	1 Buku												
2	09	04	2.01	01	Penyusunan Perutakhiran dan analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Teridentifikasi wilayah kecamatan yang rentan rawan pangan berdasarkan peta FSVA	1 Buku	13 Kecamatan	1 Buku	1 Buku	13 Kecamatan	13 Kecamatan	100%	100%	13 Kecamatan	13 Kecamatan	100%	100%	
2	09	04	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Teratasinya Kerawanan Pangan Daerah	90%												
2	09	04	2.02	01	Koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan kabupaten/kota	Terlaksananya koordinasi penanganan kerawanan pangan Kabupaten	7 Kali	-	12 Kecamatan	12 Kecamatan	13 Kecamatan	13 Kecamatan	92,31%	92,31%	13 Kecamatan	13 Kecamatan	100%	100%	
2	09	04	2.02	02	Pelaksanaan Pengadaan Pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Terdistribusinya bantuan makanan untuk penanggulangan kejadian rawan pangan	150 Balita	-	72 orang	72 orang	150 Orang	150 Orang	48,00%	48,00%	13 Kecamatan	13 Kecamatan	100%	100%	
					Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase peningkatan Konsumsi Pangan Masyarakat yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman													

Dari tabel diatas terlihat ada beberapa Program dan Kegiatan yang tidak memenuhi target sehingga kegiatan tidak bisa dilaksanakan sesuai dengan target yang telah disusun dari awal seperti :

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan
- c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dari beberapa Sub Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Kepmendagri 050-5889 indikator kinerja yang dilaksanakan dapat tercapai karena semua indikator merupakan tugas rutin administrasi Dinas Pangan seperti penyusunan DPA, RKA, DPA Perubahan, RKA Perubahan dan dokumen administrasi lainnya. Untuk evaluasi Rencana Kerja pada Tahun Anggaran 2020 yang masih merujuk kepada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dimana indikator kinerja kegiatan belum diatur oleh permendagri tersebut.

- h. Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan seluruh pendukung Kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah Kabupaten/Kota

Berdasarkan hasil evaluasi tabel diatas dimana nomenklatur kegiatan pada Tahun Anggaran 2020 dipetakan menjadi 4 Sub Kegiatan dengan indikator masing-masing. Terkait dengan capaian indikator kinerja sub kegiatan dimana target kinerja tahun 2021 sudah tercapai.

- i. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan

Pada Tahun Anggaran 2021 kegiatan ini masih terdapat beberapa sub kegiatan yang belum mencapai target seperti Sub Kegiatan Penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal yang dikarenakan adanya refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19 di Kabupaten Lima Puluh Kota

sehingga target yang telah ditetapkan belum tercapai dan pada Tahun Anggaran 2020 sub kegiatan ini hanya indikator yang melekat pada kegiatan sehingga pada tahun anggaran 2020 sudah mencapai target dan untuk Tahun Anggaran 2022 di Proyeksikan mencapai target yang telah ditetapkan.

j. Kegiatan Pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan Kabupaten/Kota

Pada Tahun Anggaran 2020 untuk pengadaan cadangan pangan pemerintah belum sesuai amanat Permentan Nomor 11 Tahun 2018 dimana Kabupaten Lima Puluh Kota harus menyediakan Cadangan Pangan sebanyak 166,6 Ton/Tahun yang digunakan untuk penanganan pasca bencana di Kabupaten Lima Puluh Kota. Pada Tahun 2021 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah melebihi Target dari sebelumnya 50 Ton menjadi 265 Ton yang digunakan untuk Bantuan Vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Lima Puluh Kota. Untuk saat ini Stok Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota sebanyak \pm 151 Ton yang saat ini terdapat di Bulog begitu juga dengan pemeliharaannya.

k. Kegiatan Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi.

Untuk kegiatan ini belum mencapai target karena disebabkan adanya refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19 dan untuk tahun ini diproyeksikan mencapai target.

l. Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan

Untuk kegiatan ini dari evaluasi tahun sebelumnya sudah mencapai target. Berdasarkan Permendagri nomor 13 Tahun 2006 Sub Kegiatan ini berupa kegiatan dan setelah pemutakhiran ke Kepmendagri 050-5889 tahun 2021 menjadi 2 Kegiatan dan 3 Sub Kegiatan.

m. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota.

Untuk kegiatan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota pada tahun anggaran 2020 belum mencapai target yang disebabkan oleh refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19 di

Kabupaten Lima Puluh Kota dan Tahun 2021 kegiatan ini sudah mencapai target dari yang ditetapkan dan untuk tahun 2022 diproyeksikan mencapai target yang telah ditetapkan.

Dampak atau Implikasi tidak tercapainya target program renstra :

1. Penanganan daerah rawan pangan yang tidak terlaksana secara optimal akan berdampak pada meningkatnya stunting dan gizi buruk pada anak balita pada suatu waktu dan wilayah.
2. Distribusi bahan pangan pokok dan bahan pangan lainnya yang tidak merata akan mengakibatkan kelangkaan pangan pada suatu wilayah yang dapat memicu gejolak harga dan gejolak sosial di tengah masyarakat.
3. Pemantauan harga pangan pokok wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota akan memberikan informasi bagi stakeholder untuk melakukan tindakan jika terjadi gejolak harga ditingkat konsumen. Apabila gejolak harga tersebut tidak terdeteksi secara dini akan mengakibatkan dampak ekonomi dan sosial yang lebih buruk pada akhirnya.
4. Pemberian bantuan pasca bencana (Cadangan Pangan Pemerintah) tidak terlaksana bisa memberikan dampak buruk bagi suatu daerah karena tidak bisa menjamin ketersediaan pangan disuatu wilayah.
5. Pemenuhan gizi di tingkat keluarga tidak terlaksana memberikan dampak gizi buruk terhadap anggota keluarga terutama anak-anak balita dan apabila ini berlanjut akan mengakibatkan stunting.
6. Pendeteksian daerah rawan pangan yang tidak terlaksana dari dini bisa menyebabkan tidak sinkronnya kebijakan yang akan diambil dalam penanganan daerah rawan pangan tersebut.
7. Pemeriksaan sampel pangan segar untuk konsumsi yang tidak terlaksana bisa mengakibatkan banyaknya komoditi pangan yang beredar ditengah-tengah masyarakat yang tidak layak konsumsi karena tercemar oleh bahan lain baik itu kimia maupun biologi yang berbahaya. Apabila ini terjadi maka pada tingkat lanjut bisa menyebabkan penyakit pada masyarakat yang mengkonsumsinya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pangan

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pangan

Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK 2020	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi	
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2022	2023
Persentase Ketersediaan Pangan		18,37	24,3	35,14	41,14	53,14	91,51%	91,51%	91,51%	91,51%
Jumlah ketersediaan energi per kap/hari			2400 kkal/kap/hr	2400 kkal/kap/hr	2400 kkal/kap/hr	2400 kkal/kap/hr	6159 kkal/kap/hari	6159 kkal/kap/hari	6.428 kkal/kap/hr	6.428 kkal/kap/hr
Jumlah ketersediaan protein per kap/hari			63 gr/kap/hr	63 gr/kap/hr	63 gr/kap/hr	63 gr/kap/hr	214 gr/kap/hari	214 gr/kap/hari	63 gr/kap/hr	63 gr/kap/hr
Jumlah penyediaan cadangan pangan daerah			39.554 ton	48,539 ton	68,539 ton	88,539 ton	151.364 Ton	28,436 Ton	60 Ton	100 Ton
Persentase kecamatan kategori rawan pangan berdasarkan Peta Komposit Indikator SKPG (aspek ketersediaan , akses pemanfaatan pangan)			13,9%	11,4 %	8,9%	6,3%	23,07%	23,07%	23,07%	23,07%
			13,9%	11,4 %	8,9%	6,3%	0	0	0	0
			13,9%	11,4 %	8,9%	6,3%	69,23%	69,23%	69,23%	69,23%
Jumlah nagari yang memiliki sarana lumbung pangan			14	17	18	19	14	16	16	16
Jumlah Nagari Mandiri Pangan			6	7	8	9	4	4	6	6
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi pangan berdasarkan angka kecukupan gizi			81,76	81,82	81,88	81,94	81,7	81,7	81,76	81,76
Persentase sampel pangan segar yang dinyatakan aman berdasarkan uji laboratorium			85%	87%	89 %	91 %	0%	0%	96%	96%
Persentase sampel pangan segar yang dinyatakan aman berdasarkan uji lapangan			95%	96%	-	-	0%	0%	96%	96%

Terwujudnya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja			75	-	-	-	65,25	65,25	-	-
---	--	--	----	---	---	---	-------	-------	---	---

Uraian Dari tabel 2.2 sebagaimana dimaksud diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Untuk indikator kinerja Persentase Ketersediaan Pangan berdasarkan IKK pada tahun 2020 persentase 18,37 % yang digunakan untuk menjaga stabilitas ketersediaan pangan di Kabupaten Lima Puluh Kota jika terjadi kelangkaan atau kerawanan pangan.
2. Jumlah Ketersediaan energi /kap/hari dan Jumlah ketersediaan protein per kap/hari sudah melebihi target dari sebelumnya. Berdasarkan dengan hasil Widyakarya Nasional Pangan Pangan dan Gizi (WNPG) bahwa angka kecukupan rata-rata pada tingkat ketersediaan energi bagi masyarakat di Indonesia sebanyak 2.400 Kkal/Ka/hari, protein 63 Gr/Kap/Hari maka persentase tingkat ketersediaan energi Kabupaten Lima Puluh Kota adalah Surplus.
3. Jumlah penyediaan cadangan pangan daerah Kabupaten Lima Puluh Kota meningkat dari Tahun sebelumnya 39,554 Ton menjadi 265 Ton pada tahun sebelumnya. Saat ini Stok Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota sebanyak \pm 151 Ton.
4. Untuk wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota masih ada Kecamatan kategori rawan pangan berdasarkan Peta Komposit Indikator SKPG dari segi aspek ketersediaan, akses pemanfaatan pangan. Untuk tahun selanjutnya target wilayah kecamatan rawan pangan menurun menjadi 11,4%.
5. Pada tahun 2021 nagari yang memiliki sarana lumbung pangan sebanyak 14 Nagari dan untuk tahun sampai target 2024 ditargetkan menjadi 19 Nagari jadi setiap tahun bertambah 1 sehingga di persentasikan menjadi 100% setiap tahunnya.
6. Jumlah Nagari Mandiri Pangan sampai tahun 2021 sebanyak 6 Nagari dirata-ratakan Nagari Mandiri Pangan untuk target setiap tahun nya bertambah 1 Pangan sehingga pada target sampai tahun 2024 menjadi 9 Nagari.
7. Pencapaian konsumsi pangan penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota masih dibawah dari harapan (skor PPH 81,7) masih sangat diperlukan

upaya oleh *stakeholder* terkait melalui implementasi strategi dan kebijakan yang mendukung melalui perubahan pola konsumsi yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman yang disingkat menjadi B2SA, guna mencapai sumber daya manusia yang berkualitas.

8. Dilihat pada tabel diatas pada tahun 2021 realisasi pencapaian uji laboratorium dan uji lapangan mencapai target 89%, Pencapaian di tahun 2021 ini tidak mencapai target. Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lainnya yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
9. Evaluasi AKIP merupakan alat dalam rangka peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, evaluasi AKIP diperlukan bagi setiap instansi pemerintah dalam rangka mempertanggungjawabkan kinerjanya sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam perencanaan organisasinya.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pangan

Berdasarkan Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pangan Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing. Sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

- a. Semakin tinggi tingkat ketersediaan energi dan protein semakin beragam ketersediaan pangan bagi masyarakat, sehingga capaian kinerja semakin baik dan dapat memacu terwujudnya kemandirian dan keandalan pangan yang selaras dengan peningkatan ketahanan pangan masyarakat.
- b. Salah satu kebijakan strategis yang dilakukan Kementerian Pertanian melalui Badan Ketahanan Pangan, yaitu mendorong penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) terutama di saat menghadapi pandemi Covid-19. CPPD memiliki peran strategis sebagai antisipasi untuk

menanggulangi keadaan darurat, kekurangan pangan, kerawanan pangan, bencana alam/sosial serta untuk memperkuat ketahanan pangan daerah dan nasional.

- c. Kerawanan pangan dapat diartikan sebagai kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakat. Keadaan rawan pangan dapat dilihat dari kondisi daerah/wilayah atau rumah tangga yang terganggu ketersediaan pangannya, dan kondisi lain pada masyarakat atau keluarga yang terganggu kemampuan aksesnya terhadap pangan tersebut. Penanganan Daerah Rawan Pangan merupakan upaya untuk menangani suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami oleh daerah, masyarakat atau rumah tangga, pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
- d. Pengembangan lumbung pangan masyarakat perlu di upayakan untuk dapat berperan dalam pengembangan penyediaan cadangan pangan bagi masyarakat. Lumbung dipandang sebagai model perangkat ketahanan pangan masyarakat desa yang cukup efektif. Akan tetapi seiring dengan masuknya model-model kelembagaan lain sistem lumbung sebagai pusat cadangan pangan, terutama di kawasan pedesaan, kini semakin sulit ditemukan.
- e. Nagari/Desa Mandiri Pangan adalah Nagari/Desa yang masyarakatnya mempunyai kemampuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi melalui pengembangan subsistem ketersediaan, Sub sistem distribusi dan subsistem konsumsi dengan memanfaatkan sumberdaya setempat secara berkelanjutan. Nagari Mandiri Pangan merupakan salah satu strategi untuk mempercepat pembangunan didaerah pedesaan, khususnya dalam memantapkan ketahanan pangan. Sebagai solusi dalam mengatasi disparitas harga pangan, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota melalui Dinas Pangan melakukan terobosan dengan kegiatan "Warung Pangan Mandiri" (Paman). Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya untuk menjaga

stabilitas pasokan dan harga pangan pokok strategis dan efisiensi rantai distribusi pemasaran dengan memperpendek rantai pasok.

- f. Pola pangan harapan ini mencerminkan susunan konsumsi pangan anjuran untuk hidup sehat, aktif dan produktif, untuk menghasilkan suatu komposisi normal atau standar pangan dalam memenuhi kebutuhan gizi penduduk. sekaligus juga mempertimbangkan keseimbangan gizi (nutricional balance), cita rasa (palatability), daya cerna (digestability), daya terima masyarakat (acceptability), kualitas dan kemampuan daya beli (affordability). Untuk tingkat konsumsi, lebih banyak ditentukan oleh kualitas dan kuantitas pangan yang dikonsumsi. Kualitas pangan mencerminkan adanya zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh yang terdapat dalam bahan pangan, sedangkan kuantitas pangan mencerminkan jumlah setiap gizi dalam suatu bahan pangan. Untuk mencapai keadaan gizi yang baik, maka unsur kualitas dan kuantitas harus dapat terpenuhi. Kualitas konsumsi pangan ditentukan oleh berbagai faktor antara lain, dari komposisi konsumsi pangan masyarakat berdasarkan kontribusi energi setiap kelompok pangan yang dikombinasikan dengan tingkat kecukupan energinya. Penilaian kualitas dan mutu konsumsi pangan seperti ini dilakukan dengan menggunakan skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang mencerminkan keseimbangan komposisi kelompok pangan dan zat gizi yang dikonsumsi. Nilai/skor mutu PPH ini juga dapat memberikan informasi mengenai pencapaian kualitas ragam (diversifikasi) konsumsi pangan. Semakin besar skor PPH maka kualitas konsumsi pangan dalam artian jumlah dan komposisi dinilai semakin baik.
- g. Saat ini permasalahan keamanan pangan yang masih menjadi perhatian utama antara lain, sering terjadinya kasus keracunan makanan, produk pangan segar kalah bersaing di pasaran akibatnya komoditi tersebut melebihi Batas Maksimum Residu (BMR), kurangnya pengawasan terhadap produk impor, penerapan sistem mutu yang belum mantap serta belum adanya pemantauan dan pengawasan secara terpadu oleh instansi terkait. Keamanan pangan merupakan aspek yang luas, dimana harus melibatkan beberapa stakeholder terkait untuk mencapai tujuan dalam penanganannya yang mencakup produsen, konsumen dan unsur pengawas dan aparat. Keamanan pangan merupakan tanggung jawab

bersama Pemerintah, produsen dan masyarakat. Untuk itu diperlukan konsep “terpadu” agar setiap pihak dapat berperan dalam rangka meningkatkan keamanan pangan.

- h. Untuk setiap instansi menyusun Laporan Kinerja yang merupakan penjabaran akuntabilitas atas perencanaan strategis instansi yang meliputi Pernyataan Penetapan Perjanjian Kinerja, RKT dan Renstra.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahap 2023

NO	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis			Catt	
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3	4	6	6	7	8	9	10	11	12
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pangan	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	3.831.248.404	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Dinas Pangan	Persentase Ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	3.831.248.404	Belanja Rutin Opd
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pangan	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	85%	94.000.000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pangan	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	85%	94.000.000	Belanja Rutin Opd
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Pangan	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (Renja Awal, Renja Perubahan, RUP Awal dan RUP Perubahan,)	5 Dokumen	12.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Pangan	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (Renja Awal, Renja Perubahan, RUP Awal dan RUP Perubahan,)	5 Dokumen	12.000.000	Belanja Rutin Opd
2	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas Pangan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	11.000.000	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas Pangan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	11.000.000	Belanja rutin opd
3	Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinas Pangan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	11.000.000	Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinas Pangan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	11.000.000	Belanja rutin opd
4	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Dinas Pangan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	11.000.000	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Dinas Pangan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	11.000.000	Belanja rutin opd
5	Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dinas Pangan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	11.000.000	Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dinas Pangan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	11.000.000	Belanja rutin opd
6	Penyusunan Laporan capaian kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Pangan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja	6 Laporan	9.000.000	Penyusunan Laporan capaian kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Pangan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi	6 Laporan	9.000.000	Belanja rutin opd

7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pangan	SKPD Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	29.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pangan	Kinerja SKPD Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	29.000.000	Belanja rutin opd
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Pangan	Perentase tertib administrasi keuangan	100%	2.020.872.604	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Pangan	Perentase tertib administrasi keuangan	100%	2.020.872.604	Belanja rutin opd
	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Pangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 orang/bulan	1.980.172.504	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Pangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 orang/bulan	1.980.172.504	Belanja rutin opd
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	Dinas Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	204 Dokumen	6.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	Dinas Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	204 Dokumen	6.000.000	Belanja rutin opd
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dinas Pangan	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.000 Dokumen	6.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dinas Pangan	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.000 Dokumen	6.000.000	Belanja rutin opd
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dinas Pangan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	24 Dokumen	8.000.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dinas Pangan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	24 Dokumen	8.000.000	Belanja rutin opd
	Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Dinas Pangan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Dinas Pangan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.000.000	Belanja rutin opd
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/Semesteran SKPD	Dinas Pangan	Pengelcaian dan Penyipen Bahan Tanggapan Pemeriksaan			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/Semesteran SKPD	Dinas Pangan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Dokumen	3.000.000	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Realisasi Anggaran	Dinas Pangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	12 Laporan	9.000.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dinas Pangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	12 Laporan	9.000.000	Belanja rutin opd
	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Dinas Pangan	Tingkat Disiplin Aparatur	100%	20.000.000	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Dinas Pangan	Tingkat Disiplin Aparatur	100%	20.000.000	Belanja Rutin OPD
	Pengadaan Pakalain Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Dinas Pangan	Tersedianya pakalain dinas beserta kelengkapannya	40 Paket	20.000.000	Pengadaan Pakalain Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Dinas Pangan	Tersedianya pakalain dinas beserta kelengkapannya	40 Paket	20.000.000	Belanja rutin opd
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Pangan	Perentase tertib administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	625.000.000	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Pangan	Perentase tertib administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	625.000.000	Belanja Rutin OPD

	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dinas Pangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	13.000.000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dinas Pangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	13.000.000	Belanja rutin opd
	Penyediaan peralatan dan Perengkapan Kantor	Dinas Pangan	Tersedianya perlengkapan gedung dinas :	1 Paket	173.000.000	Penyediaan peralatan dan Perengkapan Kantor	Dinas Pangan	Tersedianya perlengkapan gedung dinas :	1 Paket	173.000.000	Belanja rutin opd
			- Komputer	4 Unit	60.000.000			- Komputer	4 Unit	60.000.000	
			- Laptop	2 Unit	30.000.000			- Laptop	2 Unit	30.000.000	
			- Printer Brother	4 Unit	20.000.000			- Printer Brother	4 Unit	20.000.000	
			- Printer Epson	4 Unit	20.000.000			- Printer Epson	4 Unit	20.000.000	
			- Kursi Tamu	1 Set	10.000.000			- Kursi Tamu	1 Set	10.000.000	
			- Sound System/Wireless	1 Set	10.000.000			- Sound System/Wireless	1 Set	10.000.000	
			- AC	2 Unit	18.000.000			- AC	2 Unit	18.000.000	
			- Hardisk Eksternal	5 Unit	5.000.000			- Hardisk Eksternal	5 Unit	5.000.000	
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Dinas Pangan	Tersedianya peralatan rumah tangga	12 Bulan	10.000.000	Penyediaan peralatan rumah tangga	Dinas Pangan	Tersedianya peralatan rumah tangga	12 Bulan	10.000.000	Belanja rutin opd
						Penyediaan bahan logistik kantor	Dinas Pangan	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan (Pengeadaan peralatan kebersihan kantor dan tersedianya perlengkapan Alat Tulis Kantor)	1 Paket	43.676.100	Belanja rutin opd
	Penyediaan barang cetakan dan pengandaan	Dinas Pangan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengandaan yang Disediakan	2 Paket	32.500.000	Penyediaan barang cetakan dan pengandaan	Dinas Pangan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengandaan yang Disediakan	2 Paket	32.500.000	Belanja rutin opd
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Dinas Pangan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	11.500.000	Fasilitas Kunjungan Tamu	Dinas Pangan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	11.500.000	Belanja rutin opd
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Dinas Pangan	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	250.000.000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Dinas Pangan	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	250.000.000	Belanja rutin opd
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Pangan	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	80.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Pangan	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	455.000.000	Belanja rutin opd
	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Dinas Pangan	Tersedianya kendaraan dinas/operasional Dinas Kendaran Dinas Roda 2	2 Unit	55.000.000	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Dinas Pangan	Tersedianya kendaraan dinas/operasional Dinas Kendaran Dinas Roda 4 Kendaran Dinas Roda 2	1 Unit 2 Unit	375.000.000 55.000.000	Belanja rutin opd
	Pengadaan Mebel	Dinas Pangan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan : Lemari Arsip	5 Unit	25.000.000	Pengadaan Mebel	Dinas Pangan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan : Lemari Arsip	5 Unit	25.000.000	Belanja rutin opd

	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dinas Pangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	13.000.000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dinas Pangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	13.000.000	Belanja rutin opd
	Penyediaan peralatan dan Perengkapan Kantor	Dinas Pangan	Tersedianya perlengkapan gedung dinas : - Komputer - Laptop - Printer Brother - Printer Epson - Kursi Tamu - Sound System/Wireless - AC - Hardisk Eksternal	1 Paket 4 Unit 2 Unit 4 Unit 4 Unit 1 Set 1 Set 2 Unit 5 Unit	173.000.000 60.000.000 30.000.000 20.000.000 20.000.000 10.000.000 10.000.000 18.000.000 5.000.000	Penyediaan peralatan dan Perengkapan Kantor	Dinas Pangan	Tersedianya perlengkapan gedung dinas : - Komputer - Laptop - Printer Brother - Printer Epson - Kursi Tamu - Sound System/Wireless - AC - Hardisk Eksternal	1 Paket 4 Unit 2 Unit 4 Unit 4 Unit 1 Set 1 Set 2 Unit 5 Unit	173.000.000 60.000.000 30.000.000 20.000.000 20.000.000 10.000.000 10.000.000 18.000.000 5.000.000	Belanja rutin opd
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Dinas Pangan	Tersedianya peralatan rumah tangga	12 Bulan	10.000.000	Penyediaan peralatan rumah tangga	Dinas Pangan	Tersedianya peralatan rumah tangga	12 Bulan	10.000.000	Belanja rutin opd
	Penyediaan barang cetakan dan penggantian	Dinas Pangan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggantian yang Disediakan	2 Paket	32.500.000	Penyediaan bahan logistik kantor	Dinas Pangan	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan (Penggadaan peralatan kebersihan kantor dan tersedianya perlengkapan Alet Tulis Kantor)	1 Paket	43.676.100	Belanja rutin opd
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Dinas Pangan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	11.500.000	Penyediaan barang cetakan dan penggantian	Dinas Pangan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggantian yang Disediakan	2 Paket	32.500.000	Belanja rutin opd
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Dinas Pangan	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	250.000.000	Fasilitas Kunjungan Tamu	Dinas Pangan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	11.500.000	Belanja rutin opd
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Pangan	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	60.000.000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Dinas Pangan	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	250.000.000	Belanja rutin opd
	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Dinas Pangan	Tersedianya kendaraan dinas/operasional Dinas Pangan : Kendaraan Dinas Roda 2	2 Unit	55.000.000	Pengadaan barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Pangan	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	456.000.000	Belanja rutin opd
	Pengadaan Mebel	Dinas Pangan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan : Lemari Aneip	5 Unit	25.000.000	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Dinas Pangan	Tersedianya kendaraan dinas/operasional Dinas Pangan : Kendaraan Dinas Roda 4 Kendaraan Dinas Roda 2	1 Unit 2 Unit	375.000.000 55.000.000	Belanja rutin opd

	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka penyediaan infrastruktur logistik	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Laporan	13.710.000	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka penyediaan infrastruktur logistik	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Laporan	13.710.000	IKU Kepala Dinas
	Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Dokumen	11.625.000	Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Dokumen	11.625.000	IKU Kepala Dinas
	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Pangan	Persentase peningkatan Diversifikasi Konsumal Pangan	68,98%	1.327.665.000,-	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Kabupaten Lima Puluh Kota	Persentase peningkatan Diversifikasi Konsumal Pangan	68,98%	1.327.665.000,-	IKU Kepala Dinas
	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi Pasokan dan harga pangan	Kabupaten Lima Puluh Kota	Meningkatnya penyediaan dan penyaluran pangan pokok masyarakat dalam menstabilisasi pasokan dan harga pangan		308.441.000	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi Pasokan dan harga pangan	Kabupaten Lima Puluh Kota	Meningkatnya penyediaan dan penyaluran pangan pokok masyarakat dalam menstabilisasi pasokan dan harga pangan		635.691.600,-	IKU Kepala Dinas
	Penyediaan informasi harga pangan dan Neraca Bahan Makanan	Kabupaten Lima Puluh Kota	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	1 Buku	60.000.000	Penyediaan informasi harga pangan dan Neraca Bahan Makanan	Kabupaten Lima Puluh Kota	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	1 Buku	60.000.000	IKU Kepala Dinas
	Penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal	Kabupaten Lima Puluh Kota	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	6 Laporan	209.109.600	Penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal	Kabupaten Lima Puluh Kota	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	6 Laporan	209.109.600	IKU Kepala Dinas
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Lainnya	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Lainnya	Laporan	40.502.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Lainnya	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Lainnya	Laporan	40.502.000	IKU Kepala Dinas
			Pemantauan stok dan harga pangan			Pemantauan stok dan harga pangan	Kabupaten Lima Puluh Kota	Pemantauan stok, pasokan dan harga pangan	Dokumen	53.183.000	IKU Kepala Dinas
			Pengembangan kelembagaan dan jaringan distribusi pangan			Pengembangan kelembagaan dan jaringan distribusi pangan	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah kelembagaan dan jaringan distribusi pangan yang dikembangkan	6 Unit	18.860.000	IKU Kepala Dinas
	Pengembangan Kelembagaan Pangan Usaha Masyarakat Toko Tani Indonesia	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	6 Unit	56.245.000	Pengembangan Kelembagaan Pangan Usaha Masyarakat Toko Tani Indonesia	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	6 Unit	56.245.000	IKU Kepala Dinas
			Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga			Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan ketahanan pangan keluarga	30 Keluarga	100.000.000	
	Kegiatan Pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Lima Puluh Kota	Terkecilnya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten	100%	602.160.000,-	Kegiatan Pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Lima Puluh Kota	Terkecilnya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten	100%	602.160.000,-	IKU Kepala Dinas
			Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian cadangan pangan			Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian cadangan pangan	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengendalian cadangan pangan kabupaten/kota	Laporan	171.150.000	IKU Kepala Dinas
	Pengadaan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten	21,4 Ton	321.000.000	Pengadaan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten	21,4 Ton	321.000.000	IKU Kepala Dinas

	Pemeliharaan cadangan pangan pemerintah Kabupaten/Kota	Kabupaten Lima Puluh Kota	Terlaksananya Pemeliharaan Stock Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	162 Ton	10.000.000	10.000.000	162 Ton	Terlaksananya Pemeliharaan Stock Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	Kabupaten Lima Puluh Kota	Pemeliharaan cadangan pangan pemerintah Kabupaten/Kota		162 Ton	10.000.000	Dinas
	Kegiatan Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Kabupaten Lima Puluh Kota	Tercapainya Skor Pola Pangan Harapan (PPH) berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG)		289.843.400	289.843.400		Tercapainya Skor Pola Pangan Harapan (PPH) berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG)	Kabupaten Lima Puluh Kota	Kegiatan Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi			289.843.400	IKU Kepala Dinas
	Penyusunan dan penetapan Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun	Kabupaten Lima Puluh Kota	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen	46.589.840	46.589.840	1 Dokumen	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Kabupaten Lima Puluh Kota	Penyusunan dan penetapan Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun		1 Dokumen	46.589.840	IKU Kepala Dinas
	Pemberdayaan Masyarakat dan Penggerakragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penggerakragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Laporan	209.985.820	209.985.820	Laporan	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penggerakragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Dinas Pangan	Pemberdayaan Masyarakat dan Penggerakragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		Laporan	209.985.820	IKU Kepala Dinas
	Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan evaluasi konsumsi per Kapita per Tahun	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	Nagari	33.267.740	33.267.740	Nagari	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	Kabupaten Lima Puluh Kota	Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan evaluasi konsumsi per Kapita per Tahun		Nagari	33.267.740	IKU Kepala Dinas
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Kabupaten Lima Puluh Kota	Persentase penanganan daerah rawan pangan dalam mewujudkan Kemandirian dan Kedaulatan Pangan Masyarakat	33%	230.000.000	230.000.000	33%	Persentase penanganan daerah rawan pangan dalam mewujudkan Kemandirian dan Kedaulatan Pangan Masyarakat	Dinas Pangan	Program Penanganan Kerawanan Pangan		33%	230.000.000	IKU Kepala Dinas
	Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Kabupaten Lima Puluh Kota	Teridentifikasi wilayah kecamatan yang rentan pangan berdasarkan peta FSVA	1 Buku	40.000.000	40.000.000	1 Buku	Teridentifikasi wilayah kecamatan yang rentan pangan berdasarkan peta FSVA	Dinas Pangan	Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan		1 Buku	40.000.000	IKU Kepala Dinas
	Penyusunan Pemutakhiran dan analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Kabupaten Lima Puluh Kota	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	Dokumen	40.000.000	40.000.000	Dokumen	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	Kabupaten Lima Puluh Kota	Penyusunan Pemutakhiran dan analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan		Dokumen	40.000.000	IKU Kepala Dinas
	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Lima Puluh Kota	Teratasinya Kerawanan Pangan Daerah	80%	190.000.000	190.000.000	80%	Teratasinya Kerawanan Pangan Daerah	Dinas Pangan	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota		80%	190.000.000	IKU Kepala Dinas
	Koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan kabupaten/kota	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Laporan	40.000.000	40.000.000	Laporan	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Lima Puluh Kota	Koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan kabupaten/kota		Laporan	40.000.000	IKU Kepala Dinas
	Pelaksanaan Pengadaan Pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	150.000.000	150.000.000	Dokumen	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Lima Puluh Kota	Pelaksanaan Pengadaan Pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota		Dokumen	150.000.000	IKU Kepala Dinas
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Kabupaten Lima Puluh Kota	Persentase peningkatan Konsumsi Pangan Masyarakat yang Bergizi, Seimbang dan	90%	489.000.000	489.000.000	90%	Persentase peningkatan Konsumsi Pangan Masyarakat yang Bergizi, Seimbang dan	Kabupaten Lima Puluh Kota	Program Pengawasan Keamanan Pangan		90%	489.000.000	IKU Kepala Dinas

	Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Pangan segar Daerah Kabupaten / Kota	Kabupaten Lima Puluh Kota	Aman	100%	489.000.000	Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Pangan segar Daerah Kabupaten / Kota	Kabupaten Lima Puluh Kota	Selenggara dan Aman	100%	489.000.000	IKU Kepala Dinas
	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan segar Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Lima Puluh Kota	KelengkapanKeamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina	Dokumen	55.000.000	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan segar Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Lima Puluh Kota	KelengkapanKeamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina	Dokumen	55.000.000	IKU Kepala Dinas
	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	80.000.000	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	80.000.000	
	Rekomendasi Keamanan Pangan segar asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	84.000.000	Rekomendasi Keamanan Pangan segar asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	84.000.000	IKU Kepala Dinas
	Penyediaan sarana dan prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan segar asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	270.000.000	Penyediaan sarana dan prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan segar asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	270.000.000	IKU Kepala Dinas
	TOTAL				9.546.002.404,-	TOTAL				9.546.002.404,-	

Pada review awal Rencana Kerja Dinas Pangan Tahun Anggaran 2023 setelah di mutakhirkan dari Kepmendagri 050-5337 Tahun 2020 ke Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 maka ada beberapa sub kegiatan dimunculkan. Beberapa sub kegiatan yang baru dimunculkan berupa :

1. Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan yang berada di Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Sub Kegiatan ini dimunculkan dikarenakan setiap tahun BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) selalu memeriksa dokumen-dokumen keuangan di OPD sehingga membutuhkan biaya untuk menggandakan dokumen, supaya tidak terjadi pembengkakan uang pengadaan pada sub kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan lebih baik sub kegiatan ini dimunculkan.
2. Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor yang berada pada Kegiatan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Pada sub ini dimunculkan sub kegiatan baru dari sebelumnya hanya indikator tapi setelah pemutakhiran indikator-indikator tersebut sudah ada pada sub kegiatan yang telah dimutakhirkan. Sub Kegiatan yang baru tersebut adalah :
 - Penyediaan bahan logistik kantor
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang berada pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
Meningat nama sub kegiatan pemeliharaan, pajak dan perizinan untuk kendaraan dinas operasional atau lapangan maka untuk pemeliharaan kendaraan dinas eselon II di letakkan pada sub kegiatan pemeliharaan, pajak dan perizinan untuk kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ini dimutakhirkan menjadi 2 dikarenakan nomenklatur sub kegiatan tersebut hanya untuk rehab gedung kantor sedangkan untuk pembuatan atau rehabilitasi sarana dan prasarana diarahkan ke sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
5. Pada kegiatan Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi

Pasokan dan harga pangan terdapat 3 sub kegiatan yang baru dimunculkan dari sebelumnya yaitu:

- Pemantauan stok dan harga pangan merupakan sub kegiatan pendukung IKU Kepala Dinas merupakan pemetaan dari sub kegiatan Penyediaan informasi harga pangan dan Neraca Bahan Makanan
- Pengembangan kelembagaan dan jaringan distribusi pangan merupakan sub kegiatan pendukung IKU Kepala Dinas merupakan pemetaan dari sub kegiatan Penyediaan informasi harga pangan dan Neraca Bahan Makanan
- Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga merupakan sub kegiatan pendukung IKU Kepala Dinas merupakan

6. Pada kegiatan Pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan Kabupaten/Kota terdapat satu sub kegiatan baru yang dimunculkan yaitu Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian cadangan pangan merupakan kegiatan pendukung IKU Kepala Dinas

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tabel 2.5

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran Volume	Catt
1.	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Penyediaan Infrastruktur dan seluruh pendukung Kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Luak	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	2 Paket	Bantuan berupa Lantai Jemur, Rumah RMU dan Bed drayer, Fisik Lumbung Pangan, RMU, Bed Drayer, dan Gabah pengisian lumbung
2.	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Penyediaan Infrastruktur dan seluruh pendukung Kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Lareh Sago Halaban	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	2 Paket	Bantuan berupa Lantai Jemur, Rumah RMU dan Bed drayer, Fisik Lumbung Pangan, RMU, Bed Drayer, dan Gabah pengisian lumbung
3.	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Penyediaan Infrastruktur dan seluruh pendukung Kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah Kabupaten/Kota	Nagari Taeh Bukik Kecamatan Payakumbuh	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	10 Paket	Bantuan berupa bangunan warung paman dan sarana dan prasarana pendukung warung
4.	Program Pengelolaan	Penyediaan Infrastruktur dan	Kecamatan Guguak dan	Jumlah Infrastruktur Pendukung	3 Paket	Bantuan berupa bangunan warung

	Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	seluruh pendukung Kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Mungka	Kemandirian Pangan yang Tersedia		paman dan sarana dan prasarana pendukung warung
5.	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Penyediaan Infrastruktur dan seluruh pendukung Kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah Kabupaten/Kota	Jrg. Sungai Rimbang Nagari Solok Bio-bio Kecamatan Harau	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	1 Paket	Bantuan berupa bangunan warung paman dan sarana dan prasarana pendukung warung
6.	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Penyediaan Infrastruktur dan seluruh pendukung Kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah Kabupaten/Kota	Nagari Mungo Kecamatan Luak	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	1 Unit	Bantuan berupa bangunan warung paman dan sarana dan prasarana pendukung warung
7.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jrg. Koto Tuo Mungka Nag. Mungka, Kab. Lima Puluh	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	2 Paket	Bantuan Pembuatan rumah bibit, benih sayuran, sarana dan prasarana pertanaman
8.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Kecamatan Luak	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	2 Paket	Bantuan Pembuatan rumah bibit, benih sayuran, sarana dan prasarana pertanaman
9.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Kecamatan Lareh sago Halaban	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	2 Paket	Bantuan Pembuatan rumah bibit, benih sayuran, sarana dan prasarana pertanaman

Ada 9 usulan Pokok Pikiran Legislatif yang akan diakomodir dalam Rencana Kerja Dinas Pangan Tahun Anggaran 2023. Usulan tersebut berupa :

1. Bantuan Pembuatan Lantai Jemur, Rumah RMU dan Bed drayer, Fisik Lumbung Pangan, RMU, Bed Drayer, dan Gabah pengisian lumbung sebanyak 2 Paket di Kecamatan Luak pada Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
2. Bantuan Pembuatan Lantai Jemur, Rumah RMU dan Bed drayer, Fisik Lumbung Pangan, RMU, Bed Drayer, dan Gabah pengisian lumbung sebanyak 2 Paket di Kecamatan Lareh Sago Halaban Program

Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan

3. Bantuan berupa bangunan warung paman dan sarana dan prasarana pendukung warung sebanyak 10 Paket di Nagari Taeh Bukik Kecamatan Payakumbuh pada Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
4. Bantuan berupa bangunan warung paman dan sarana dan prasarana pendukung warung sebanyak 3 Paket di Kecamatan Guguk dan Kecamatan Mungka pada Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
5. Bantuan berupa bangunan warung paman dan sarana dan prasarana pendukung warung sebanyak 1 Paket di Jr. Sungai Rimbang Nagari Solok Bio-bio Kecamatan Harau pada Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
6. Bantuan berupa bangunan warung paman dan sarana dan prasarana pendukung warung sebanyak 1 Unit di Nagari Mungo Kecamatan Luak pada Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan.
7. Bantuan Pembuatan rumah bibit, benih sayuran, sarana dan prasarana pertanaman sebanyak 2 Paket di Jrg. Koto Tuo Mungka Nag. Mungka, Kecamatan Mungka pada Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
8. Bantuan Pembuatan rumah bibit, benih sayuran, sarana dan prasarana pertanaman sebanyak 2 Paket di Kecamatan Luak pada Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
9. Bantuan Pembuatan rumah bibit, benih sayuran, sarana dan prasarana pertanaman sebanyak 2 Paket Kecamatan Lareh Sago Halaban pada Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Untuk usulan Pokir (Pokok Pikiran) dari Pemangku Kepentingan Tahun Anggaran 2023 telah diinput melalui aplikasi SIPD dan diteruskan ke Dinas Pangan sebagai OPD Pelaksana kegiatan dan usulan tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PD .

BAB III

TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang mencakup empat sub sistem yaitu ketersediaan, keterjangkauan, konsumsi, dan keamanan pangan. a) Ketersediaan pangan dalam jumlah dan jenis yang cukup untuk seluruh penduduk; b) Keterjangkauan pangan yang lancar dan merata; c) Konsumsi pangan setiap individu yang memenuhi kecukupan gizi dan kaidah kesehatan; dan d) Keamanan Pangan yang terjamin dan berkualitas oleh sebab itu arah kebijakan Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota, disusun berpedoman pada RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2022-2026 dan RPJMN tahun 2020-2024 serta RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2022-2026. Tujuannya agar dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Pangan dapat menjabarkan dan mensinkronisasikan kebijakan yang telah digariskan secara regional dan nasional.

Arah kebijakan dan strategi dalam RPJMN 2020-2024 point ketiga terkait dengan ketahanan pangan adalah Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan dengan strategi :

1. meningkatkan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan
2. meningkatkan ketersediaan pangan hasil pertanian, perikanan dan pangan hasil laut terutama melalui peningkatan produktivitas dan teknik produksi secara berkelanjutan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga kebutuhan pokok
3. Meningkatkan produktivitas, kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) pertanian, perikanan serta kepastian pasar
4. menjaga keberlanjutan produktivitas sumber daya pertanian yang adaptif terhadap perubahan iklim, sistem pertanian presisi, pengelolaan lahan dan air irigasi;
5. meningkatkan tata kelola sistem pangan nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pangan

Secara umum tujuan pembangunan ketahanan pangan yaitu mewujudkan dan mengembangkan sistem ketahanan pangan yang kuat, dinamis dan sinergis. melalui pengembangan sub sistem ketersediaan pangan, sub sistem konsumsi pangan, sub sistem distribusi pangan, mutu dan keamanan pangan dengan memperhatikan potensi, keragaman sumberdaya pangan dan budaya.

Adapun tujuan Dinas Pangan adalah sebagai berikut :

“Mewujudkan kedaulatan dan kemandirian pangan yang kuat, dinamis dan sinergis melalui peningkatan Pola Konsumsi Pangan (PPH), aksesibilitas, distribusi dan keamanan pangan sesuai kewenangan urusan pangan”.

Sasaran yang ingin dicapai Dinas Pangan dalam peningkatan ketahanan pangan adalah :

1. Terwujudnya kemandirian dan kedaulatan pangan yang selaras dengan peningkatan ketahanan pangan, dengan indikator utama yaitu:
 - a. Jumlah ketersediaan energi dan protein /kapita/hari.
 - b. Jumlah penyediaan cadangan pangan pemerintah daerah
 - c. Persentase nagari kategori rawan pangan berdasarkan peta komposit indikator SKPG (aspek ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan)
 - d. Jumlah nagari yang memiliki sarana lumbung pangan.
 - e. Jumlah Lembaga/Kelompok masyarakat yang Melaksanakan Kegiatan Distribusi Jual Beli komoditas pangan di nagari.
 - f. Tersedianya data harga pangan perbulan
2. Meningkatnya konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang dan aman, dengan indikator utama yaitu:
 - a. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi pangan berdasarkan angka kecukupan gizi.
 - b. Persentase sampel pangan segar yang dinyatakan aman berdasarkan uji laboratorium dan uji lapangan
 - c. Rata-Rata Konsumsi Energi dan Protein Masyarakat

3.3 Program Dan Kegiatan

3.1.1 Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan Program dan Kegiatan yaitu :

- a. Masih kurangnya Lumbung Pangan masyarakat di Nagari dalam rangka mengantisipasi terjadinya rawan pangan di suatu wilayah.

- b. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang Pola Konsumsi B2SA.
- c. Masih adanya balita yang stunting di setiap Kecamatan.
- d. Masih kurangnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya pemenuhan gizi keluarga di tingkat rumah tangga melalui kegiatan Pemanfaatan Pekarangan Lestari (P2L).
- e. Masih adanya kecamatan yang rawan pangan.
- f. Kurangnya pengetahuan masyarakat terkait dengan keamanan pangan untuk di konsumsi.

3.1.2 Uraian garis besar

Secara garis besar pembangunan ketahanan pangan sangat dibutuhkan di Kabupaten Lima Puluh Kota melalui Program dan Kegiatan yang di usulkan pada Rencana Kerja Dinas Pangan Tahun 2023 sebagai salah satu OPD pendukung untuk pencapaian visi dan misi RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota 2021-2026.

Dalam penyusunan program dan kegiatan untuk tahun 2023 yang direncanakan yang telah dimutakhirkan dari Kepmendari 050-5337 ke Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 maka untuk tahun 2023 direncanakan sebanyak 5 program, 14 kegiatan dan 55 Sub Kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

- a. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**
 - **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
 - Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
- **Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
 - Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas
 - Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**
 - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik
 - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

- Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
 - **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- b. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan**
- **Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**
 - Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan
 - Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Lantaijemur
 - Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik

- Sub Kegiatan Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan

c. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

- **Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga**

- Sub Kegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan
- Sub Kegiatan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
- Sub Kegiatan Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan
- Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya
- Sub Kegiatan Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan
- Sub Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia

- **Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota

- **Kegiatan Pelaksanaan target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**

- Penyusunan dan penetapan target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun
- Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun
- d. Program Penanganan Daerah Rawan Pangan**
- **Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**
 - Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan
 - **Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota
 - Pelaksanaan Pengadaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- e. Program Pengawasan Keamanan Pangan**
- **Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**
 - Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten /Kota
 - Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
 - Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota

3.1.3 Penjelasan Rumusan Program dan Kegiatan Tidak Sesuai dengan Rancangan Awal

Berdasarkan dari pemetaan Program dan Kegiatan dari Kepmendagri 050-5337 ke Kepmendagri 050-5889 terjadi perubahan indikator yang cukup signifikan sehingga Program dan Kegiatan yang disusun dari awal tidak lagi menjadi bias dikuatirkan pencapaian target Indikator Kinerja Utama Dinas Pangan tidak terpenuhi. Masalah pagu dana

untuk tahun anggaran 2023 masih menunggu penetapan KUA-PPAS tahun Anggaran 2023.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Sebagai perwujudan dari beberapa strategi dan kebijakan dalam rangka mencapai setiap misi, maka langkah operasional harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, dan misi organisasi.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkat yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, proses, output, outcomes maupun impacts sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.03.00 DINAS PANGAN
 Sub Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.03.00 DINAS PANGAN

Kode	Usunan/ Bidang Usunan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2023			Prakiraan Biaya Rencana Tahun 2024				
				Hasil Kegiatan	Luka Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Kegiatan	Pagu Indikatiff (Rp.)
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
URUSAN PEMERINTAHAN 8 DANG PANGAN											
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
2	09	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	8.190.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12.000.000	
2	09	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	8.024.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	13.000.000	
2	09	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4.170.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	13.000.000	
2	09	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	8.024.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	13.000.000	
2	09	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	4.190.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	13.000.000	
2	09	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	3.110.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	11.000.000	
2	09	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	26.190.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	31.000.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											
2	09	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/bulan	2.322.87.289	Dana Transfer Umum - Dana	0	
									19.883.750.000		
									1.913.500.000		
									104.900.000		
									10.247.107.469		
									3.296.445.888		
									83.536.000		

Kode	Usuan/ Bidang Usuan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Praliman Mju Rencana Tahun 2024		
			Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target
2 09 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								422,017,700			487,100,000
2 09 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disejatkan				1 Paket		7,106,000			15 000,000
2 09 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perengkapan Kantor yang Disejatkan				1 Paket		102,143,200			250 000,000
2 09 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disejatkan				1 Paket		10,000,000			50 000,000
2 09 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disejatkan				1 Paket		0			50 000,000
2 09 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disejatkan				2 Paket		24,154,500			35 000,000
2 09 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				5 Laporan		14,700,000			12 500,000
2 09 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan		262,714,000			275 000,000
2 09 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuan Pemerintah Daerah								15,070,000			135,900,000
2 09 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disejatkan				3 Unit		0			60 000,000
2 09 01 2.07 05	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disejatkan				5 Unit		15,000,000			75 000,000

Kode	Usaha/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023			Prediksi 11111 Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Kegiatan	Target
2 09 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemasintihan Daerah						209,755,300				350,700,000
2 09 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			0 Laporan	3,70,000				5 000,000
2 09 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disejatkan			0 Laporan	25,130,300				45 000,000
2 09 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			0 Laporan	38,165,000				300 000,000
2 09 01 2.09	Pemeliharaan Bersang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemasintihan Daerah						221,279,000				535,900,000
2 09 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Penunjang Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan diba/arkan Pajaknya			1 Unit	195,63,000				250 000,000
2 09 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perorangan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perorangan			8 Unit	0				0
2 09 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			0 Unit 40 Unit	0				25 000,000
2 09 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			0 Unit 1 Unit	0				85 000,000
2 09 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	26,116,000				175 000,000

Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.03.00 DINAS PANGAN
Sub Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.03.00 DINAS PANGG/IN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023				Pratman Mijju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan yang Dipelihara/Direhabilitasi	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatiff (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatiff (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan				Hasil Kegiatan	Tokoh Uluar	
2 09 02	Bangunan Lainnya												
2 09 02 2.01	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMAHANDIRIAN PANGAN												
2 09 02 2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						5.524.998.000					6.125.200.000	
2 09 02 2.01 01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan		Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia			3 Unit	5.000.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				5.500.000.000	
2 09 02 2.01 03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya		Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia			2 Unit	149.198.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				200.000.000	
2 09 02 2.01 04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik		Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik			0 Laporan	250.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				275.000.000	
2 09 02 2.01 05	Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan		Jumlah Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur untuk Mendukung Kemandirian Pangan			0 Dokumen	125.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				150.000.000	
2 09 03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT						923.467.600					1.482.150.000	
2 09 03 2.01	Penyediaan dan Penyakuran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota : Jelang rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan						308.413.000					687.150.000	
2 09 03 2.01 01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan		Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan			1 Laporan	60.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				75.000.000	
2 09 03 2.01 02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		Pangan Berbasis Sumber Day Lokal yang Tersedia			6 Laporan	79.058.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				220.000.000	
2 09 03 2.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok		Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan			0 Laporan	80.000.000	Dana Transfer				100.000.000	

Kode	Unsur/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023			Prabandian Maju Rencana Tahun 2024	
		Capaian Program	Kelembagaan Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Catatan Penting	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Kelembagaan Sub Kegiatan		
	dan Pangan Lainnya		Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya						
2 09 03 2.01 04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan		Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan			0 Dokumen		0	55.000.000
2 09 03 2.01 05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan		Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan			6 Unit		0	17.250.000
2 09 03 2.01 06	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia		Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan			6 Unit		89.383.000	95.000.000
2 09 03 2.01 07	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga			30 Keluarga		0	121.000.000
2 09 03 2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota							331.000.000	490.000.000
2 09 03 2.02 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota		Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota			12 Laporan		0	125.000.000
2 09 03 2.02 03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota		Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota			21,4 Ton		321.000.000	350.000.000
2 09 03 2.02 04	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota		Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara			162 Ton		10.000.000	15.000.000
2 09 03 2.04	Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun		Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun			1 Dokumen		44.142.800	50.000.000
2 09 03 2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi							284.006.600	395.000.000

Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.03.00 DINAS PANGAN
Sub Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.03.00 DINAS PANGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Luas Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target
2 09 03 2.04 02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penggerak dalam Penggerak Berbasis Sumber Daya Lokal		Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penggerak Berbasis Sumber Daya Lokal			0 Laporan			206,584,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			270,000,000
2 09 03 2.04 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun		Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun			0 Laporan			33,279,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			35,000,000
2 09 04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN												
2 09 04 2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan		Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan			0 Dokumen			11,544,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			50,000,000
2 09 04 2.02	Pemangan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota												
2 09 04 2.02 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota		Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota			0 Laporan			40,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			45,000,000
2 09 04 2.02 02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			0 Dokumen			150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			175,000,000
2 09 05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN												
2 09 05 2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota												
2 09 05 2.01 01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota		Kelembagaan/Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina			0 Dokumen			93,672,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			57,500,000
2 09 05 2.01 03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota			0 Dokumen			55,295,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0
2 09 05 2.01 04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota			0 Dokumen			74,455,000	Dana Transfer Umum-			87,500,000
2 09 05	202,500,000												
2 09 05	202,500,000												

Unit Organisasi : 2.09.0.00.00.03.00 DINAS PANGAN
 Sub Unit Organisasi : 2.09.0.00.00.03.00 DINAS PANGAN

Kode	Usuan/ Bidang Usuan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Rekuran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatorif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatorif (Rp.)	
2 09 05 2.01 05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota		Kabupaten/Kota							Dana Alokasi Umum						
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				0 Dokumen	77,249,980	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum							57,500,000
TOTAL									10.247.107.468							19.883.750.000

TABEL 4.2
RENCANA TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PANGAN
TAHUN 2021 s/d 2026

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Jumlah Ketersediaan Energi dan Protein kap/hari.	2400 kkal /kap/hari	2400 kkal /kap/hari	2400 kkal /kap/hari	2400 kkal /kap/hari	2400 kkal /kap/hari	2400 kkal /kap/hari	2400 kkal /kap/hari
		63 gr/kap/hr	63 gr/kap/hr	63 gr/kap/hr	63 gr/kap/hr	63 gr/kap/hr	63 gr/kap/hr	63 gr/kap/hr
2	Jumlah penyediaan cadangan pangan pemerintah daerah	39.554 ton	48,539 ton	68,539 ton	88,539 ton	108,539 ton	166,539 ton	128,539 ton
3	Persentase kecamatan kategori rawan pangan berdasarkan peta komposit indikator SKPG (aspek ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan)	13,9%	11,4 %	8,9%	6,3%	3,8%	0%	0%
		13,9%	11,4 %	8,9%	6,3%	3,8%	0%	0%
		13,9%	11,4 %	8,9%	6,3%	3,8%	0%	0%
4	Jumlah nagari yang memiliki sarana lumbung pangan	14	17	18	19	20	21	21
5	Jumlah Nagari Mandiri Pangan	6	7	8	9	10	11	11
6	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi pangan berdasarkan angka kecukupan gizi.	81,76	81,82	81,88	81,94	82,00	82,06	82,06
7	Persentase sampel pangan segar yang dinyatakan aman berdasarkan uji laboratorium.	85 %	87 %	89 %	91 %	93%	95 %	95%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa untuk Jumlah Ketersediaan Energi kap/hari 2400 Kkal/kap/hari dan Ketersediaan Protein 63 gr/kap/hari. Untuk Jumlah penyediaan cadangan pangan pemerintah daerah sampai akhir RPJMD 2021-2026

sebanyak 128.539 Ton dan untuk persentase kecamatan kategori rawan berdasarkan peta komposit indikator SKPG di akhir RPJMD target nya 0%. Sampai Tahun 2021 jumlah nagari yang memiliki memiliki sarana lumbung pangan sebanyak 18 Nagari berdasarkan target dari IKU sampai akhir RPJMD 21 Nagari. Jumlah Nagari Mandiri Pangan yang dibina Dinas Pangan sampai tahun 2021 sebanyak 25 Nagari dan target sedangkan target dari akhir RPJMD di 2021 dan 2026 menambah sebanyak 6 Nagari sedangkan pencapaian skor PPH diakhir RPJMD 82,06. Persentase sampel pangan segar yang dinyatakan aman berdasarkan uji laboratorium sampai akhir RPJMD 95% yang dinyatakan aman untuk dikonsumsi. .

TABEL 4.3
INDIKATOR KINERJA DAERAH DINAS PANGAN
TAHUN 2021 s/d 2026

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun							Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	OPD Pelaksana	KET
				2021	2022	2023	2024	2025	2026				
				5	6	7	8	9	10				
1													
III													
1	Ketersediaan pangan utama	Kg/ka/thn	353,53	368,54	380,85	393,15	405,45	417,75	430,06	430,06	430,06	Dinas Pangan	
2	Ketersediaan energi dan protein perkapita	Kg/ka/thn	6.159	6.248	6.337	6.426	6.515	6.604	6.693	6.693	6.693	Dinas Pangan	
3	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	84,09	70	78	80	82	84	86	86	86	Dinas Pangan	
4	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	%	18,37	24,3	35,14	41,14	53,14	74,15	100	100	100	Dinas Pangan	PMDN 18/2020

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 disusun melalui proses tahapan yang cukup panjang mulai dari Musrenbang Nagari, Musrenbang Kecamatan sampai Musrenbang Tingkat Kabupaten dalam rangka memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi didalam pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan Dinas Pangan. Dalam penyusunan rumusan program dan kegiatan urusan pangan perlu adanya perhatian khusus dari pihak pemangku kepentingan dari segi pendanaan dan fasilitas untuk menunjang pembangunan ketahanan pangan pangan di Kabupaten Lima Puluh kota untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan program / kegiatan sehingga bisa mewujudkan visi dan misi bupati yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026.

Kaidah-kaidah pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 sebagai berikut:

- 1) Di dalam Penyusunan Renja Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 memerlukan waktu yang cukup panjang, dikarenakan harus menyesuaikan dengan Kepmendagri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- 2) Rencana Kerja Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 dalam upaya Sinkronisasi dan Sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi Sumatera Barat maupun yang bersumber dari APBN, harus memperhatikan/mempedomani dokumen-

dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RPJP, RPJMN, RPJMD Provinsi, RPJMD Kabupaten dan Renstra Dinas).

Selain hal tersebut jika dalam proses pelaksanaan kegiatan Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2023 diperlukan perubahan dan revisi, maka akan dilaksanakan dengan memperhatikan aturan yang berlaku.

Tajung Pati, 17 Maret 2022

Kepala Dinas Pangan



GUSDIAN LAORA, SKM, M.Si

NIP. 19650827 198803 1 004